



Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube

Shelsy Merinda^{1*}, Dian Amelia,² Upita Anggunsuri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author's Email : shelsy.merinda@gmail.com

Abstract

The use of social media in online investment activities should ideally provide convenience to the public for investing their assets. The prevalence of online investments within the community does not rule out the possibility that some of them are illegal or unauthorized investments, leading to losses for citizen. Legal protection can be provided to investors namely domains of illegal futures brokerage companies, cessation of illegal futures trading promotion, monitoring and observation of illegal futures trading sites by the regulatory authority. However, there are no explicit rules regarding penalties for influencers promoting binary option trading due to the lack of clear regulations about binary options. The research questions addressed in this study are: What is legal protection to investors in illegal investments YouTube? What is the function of BAPPEBTI to prevent illegal investments due to online influencer promotions YouTube? This research uses the normative juridical. The Conclusion of the research are BAPPEBTI offers preventive protection to the public by continually monitoring and educating about investment procedures in line with regulations. BAPPEBTI can block illegal sites based on regulation, but it can't prohibit binary option trading due to the persistent emergence of domain sites. Contradictory regulations regarding the submission of claims for Restitution and Compensation result in investors lacking legal protection. BAPPEBTI's role involves ongoing efforts in monitoring, observation, blocking illegal investment websites, education, and public awareness campaigns. BAPPEBTI is also part of the anti investment scam task force to halt investment solicitation and remove content related to Quotex and binary options.

Keywords : Legal Protection, Investor, and Quotex.

Abstrak

Penggunaan media sosial dalam kegiatan investasi secara online, hendaknya memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menginvestasikan asetnya. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan investasi ilegal atau tidak berizin, membuat masyarakat mengalami kerugian. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor berupa pemblokiran domain situs perusahaan pialang berjangka ilegal, Penghentian kegiatan promosi perdagangan berjangka ilegal, pengawasan dan pengamatan munculnya situs ilegal perdagangan berjangka oleh Bappebti. Namun, tidak secara tegas memberi aturan terkait sanksi bagi pihak *influencer* yang mempromosikan *trading binary option* dikarenakan belum ada peraturan yang jelas tentang *binary option* tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media online influencer melalui akun Youtube. 2. Bagaimana peran BAPPEBTI terhadap investasi ilegal yang beredar akibat promosi media online influencer melalui akun Youtube. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bappebti memberi perlindungan secara preventif kepada masyarakat dengan terus melakukan pengawasan dan edukasi tentang tata cara berinvestasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bappebti dapat melakukan pemblokiran situs ilegal yang muncul dengan dasar hukum yang kuat tetapi tidak dapat melarang orang bertransaksi *binary option* karena situs domainnya muncul. Adanya aturan yang bertentangan mengenai pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi mengakibatkan investor tidak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Bappebti upaya pengawasan, pengamatan, pemblokiran terhadap situs web investasi ilegal, edukasi, dan sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat. Bappebti juga tergabung di dalam Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan kegiatan penawaran investasi, dan menghapus semua konten Quotex dan *binary option*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor dan Quotex.

1. Pendahuluan

Berkembangnya zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi yang semakin berubah¹ dan berdampak kepada perubahan tata cara masyarakat dalam mengelola dan membangun

¹ Mila Surahmi. (2019). "Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang)". *Jurnal Thengkyang*. 2(1), p. 86.

usahanya sehingga dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat diupayakan dengan menciptakan iklim investasi yang menarik, tata kelola yang sederhana, pelayanan yang lancar serta sarana dan prasana yang menunjang.² Pada saat ini terdapat ragam investasi yang baru, seperti investasi surat berharga, investasi barang komoditas utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta investasi lainnya.³ Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan investasi yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor.⁴ Salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi ialah perdagangan berjangka komoditi.⁵ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bappebti memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi investor perusahaan pialang berjangka, yang tidak mendapatkan izin usaha guna mencegah terjadinya kasus kerugian pada masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau peraturan pelaksana yang berlaku. Selain itu, Bappebti juga berperan dalam menutup celah bagi pialang berjangka ilegal untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

Peran Bappebti dalam memblokir situs-situs investasi ilegal dan tidak memberi celah kepada pialang berjangka ilegal merupakan implementasi dari Pasal 49 Angka (1a) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa "Setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti", serta Pasal 2 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, "Bursa Berjangka hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Kepala Bappebti".

Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia adalah *Trading Binary Option*.⁶ Sejak tahun 2018 *trading binary options* melalui pemasaran media massa digital sudah mulai berkembang di Indonesia. Skema *binary options* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka (futures trading). Pada Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 sistem *Binary Option* tidak termasuk komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka. Tetapi pada Pasal 3 Peraturan tersebut yang dapat

² Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. (2017). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 115

³ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Febrianto. (2022). *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, p. 1

⁴ Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. 2(1). p. 1

⁵ BAPPEBTI. (2022). "*Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*", http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf.

⁶ KONTAN, "*BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia*", (2020), <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>.

dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, meliputi: indeks saham, indeks emas, mata uang asing, dan saham tunggal asing. Komoditi tersebut dapat dijadikan subjek kontrak berjangka setelah mendapat persetujuan dari kepala Bappebti.

Quotex merupakan *platform trading binary option* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Di Indonesia aplikasi quotex cukup populer, dibuktikan dengan banyaknya iklan-iklan quotex di berbagai sosial media. Bahkan, artis serta *influencer* ikut menjelaskan aplikasi quotex dengan terang-terangan, bagaimana cara menggunakannya sampai menjadi anggota untuk di bimbing. Cara kerja yang diterapkan aplikasi *trading binary option* ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep judi *online* karena tidak ada komoditi yang diperdagangkan yang menyebabkan Quotex sebagai aplikasi *trading* yang ilegal dan dilarang beroperasi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, Quotex juga tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan berdasarkan situs resmi Quotex, tercatat sudah lebih dari 100 ribu perdagangan yang dilakukan setiap harinya.⁷

Platform investasi ilegal ini banyak dikenalkan oleh selebgram, youtuber, artis, dan *influencer*. Atau biasa disebut sebagai *affiliator*, bertugas mempromosikan sistem kerja aplikasi *trading* yang mirip dengan *binary option*, yakni menebak kisaran pergerakan harga pada sebuah grafik mata uang atau saham, pilihannya bisa beli atau jual. Menebak kisaran atau pergerakan harga aset yang pasalnya jika tebakan investor salah, modal yang di tanamkan akan di ambil oleh penyedia *platform* yang keuntungannya dibagi dengan *affiliator* yang bertugas mempromosikan *platform* terkait. ⁸ Indeks saham dan mata uang asing yang digunakan dalam menebak pergerakan harga merupakan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak derivatif yang diperdagangkan di luar bursa berjangka. Sehingga platform Quotex harus terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *trading* ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Ganti Rugi Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi "Permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata" dalam hal sebagaimana yang disebutkan pada poin a dan b Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022.

Dilihat pada kasus Quotex, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG permohonan Restitusi dan Kompensasi yang diajukan oleh korban yaitu Permohonan dari Finsensius Mendrofa & Partners (FMP Law Firm), Permohonan dari Perhimpunan Paguyuban Doni Salmanan yang diwakili oleh Feliks Multiwijaya tertanggal 19 Oktober 2022, dan Permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 24 Oktober 2022 adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana pencucian uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan Restitusi dan Kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

⁷ Siti Hadijah. (2023). *Mengenal Quotex Trade, Aplikasi Trading Ilegal yang Dipromosikan Doni Salmanan*, <https://www.cermati.com/artikel/amp/quotex-trade>.

⁸ Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto., (2022), *Op.Cit*, p. 3

Permohonan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 Angka (1) huruf a dan b ditentukan ruang lingkup permohonan Restitusi dan Kompensasi. Pasal 2 Angka (1) Huruf a menyatakan, bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan keputusan LPSK. Dalam Pasal 2 Angka (1) Huruf b menjelaskan bahwa permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, maka Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan memperhatikan Undang-undang yang berlaku sekarang, KUHP baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Bahwa dalam Pasal 91 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan: "Perampasan barang tertentu dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Angka (1) Huruf b yang dapat dirampas meliputi barang tertentu atau tagihan: d. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, e. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana". Keberadaan barang bukti yang dihubungkan dengan ketentuan pasal diatas barang milik Terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana maupun berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana merupakan barang bukti yang dapat dirampas.

Dengan demikian terdapat pertentangan peraturan (disharmonisasi regulasi) yang mana pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG barang bukti yang disita tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah dengan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal⁹ yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Sifat dari penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, maksudnya yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan juga sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang perlindungan hukum investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online* di Youtube. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif¹⁰ terhadap data primer dan sekunder dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 11

¹⁰ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, p. 69

3. Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube

Maraknya kegiatan investasi ilegal membuat masyarakat mengalami kerugian dalam investasi, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat (investor) dari resiko yang ditanggung saat melakukan kegiatan investasi tersebut.¹¹ Sehingga diperlukan upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemberian sanksi) merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini dapat berupa penetapan suatu aturan atau melalui kebijakan pada pembatasan tertentu. Perlindungan hukum terhadap investor pengguna *platform trading* Quotex secara preventif bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan. Sehingga upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi ilegal tersebut. Upaya yang bersifat preventif yang dilakukan Bappebti seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat¹², upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pengawasan dan pengamatan secara *online* terhadap situs-situs web dari entitas perdagangan berjangka maupun yang berkedok perdagangan berjangka termasuk entitas *binary option*. Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam langkah pencegahan (preventif) agar tidak menimbulkan kerugian terkait trading dengan *binary option* Bappebti meminta bantuan untuk melakukan pemblokiran terhadap situs web dari entitas-entitas tersebut termasuk Quotex dan sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap situs-situs yang menawarkan *trading binary option*.¹³

Platform quotex dan beberapa situs *trading binary option* sampai saat sekarang ini situs-situsnya yang telah di blokir berkali-kali oleh Menkominfo atas rekomendasi dari Bappebti masih bisa dibuka sehingga orang-orang masih bisa melakukan *trading*. Hal ini dikarenakan domainnya mudah berubah dan selalu muncul dengan domain yang berbeda apalagi perusahaan *trading binary option* ini memang berasal dari luar negeri. Oleh karenanya terkait sistem *trading binary option* ini pihak Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada *trading binary option*.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif dapat dilakukan dengan menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi melalui menindaklanjuti laporan ataupun permintaan ganti kerugian yang dialami korban kepada penyedia jasa *binary option* tersebut. Perlindungan preventif dan represif

¹¹ Kadek Endra Bayu Sudiarta. 2013. "Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal, *Jurnal Kertha Semaya*, 1(8), p. 2

¹² Nando Mantulangi. 2017. "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong". *Jurnal Lex Administratum*, 5(1), p. 108

¹³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579.

harus diberikan kepada korban kasus *binary option*. Perlindungan hukum represif yang dapat diberikan dapat melalui pemberian sanksi terhadap pihak *binary option*, serta sanksi perdata berupa penggantian kerugian baik material maupun immaterial bagi korban pengguna jasa *binary option*.

Doni Salmanan sebagai *affiliator platform* Quotex terus mengajak dan mempromosikan *platform* Quotex kepada orang-orang agar tertarik untuk mendaftar dan menandatangani pada akun quotex. Doni banyak *memosting* video pada akun Youtube nya dimana dalam video tersebut ia mendapatkan keuntungan saat melakukan *trading* di akun quotex, dan juga memperlihatkan keberhasilannya memindahkan keuntungan yang ada di dalam saldo akun Quotex kedalam rekening bank nya. Tujuannya dalam membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung berita bohong dan menyesatkan tersebut, yaitu untuk menaikkan pengikut sosial media dan agar orang-orang merasa tertarik lalu mendaftar sebagai member Quotex melalui *link* yang telah diberikan oleh *affiliator* sehingga *affiliator* dapat mengambil keuntungan dari setiap orang yang melakukan pendaftaran dan menandatangani uangnya di Quotex.¹⁴ Terhitung sampai dengan bulan Februari 2022 Doni telah berhasil mengajak kurang lebih sebanyak 25.000 orang untuk mendaftar Quotex melalui *link* yang diberikannya melalui akun Youtube King Salmanan.¹⁵

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang:

"mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung."

Dari banyaknya korban yang dirugikan oleh investasi ilegal berbasis teknologi *trading* ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Ganti Rugi Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang berbunyi "Permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata" dalam hal sebagaimana yang disebutkan pada poin a dan b Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022.

Korban dari *platform* investasi ilegal ini dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebelum melakukan gugatan perdata, korban harus memastikan terpenuhinya unsur penipuan dalam tindak pidana pencucian uang oleh pelaku. Jika korban telah melakukan gugatan pidana, dan pada putusan hakim memutuskan pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka korban tidak akan dibebankan pembuktian secara rinci, dikarenakan pelaku telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Hasil dari gugatan pidana kemudian dijadikan alat bukti tertulis untuk melakukan gugatan perdata.

Pasal 101 KUHAP berbunyi: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Hal ini terkait dengan eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata. Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Permintaan eksekusi dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut

¹⁴ Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT BDG, *Penjatuhan Putusan Terdakwa*, p. 20

¹⁵ *Ibid.* p. 51.

dieksekusi, baik secara lisan atau tertulis. Ketua pengadilan atau hakim yang memutus perkara memerintahkan kepada tergugat dalam waktu paling lama 8 hari agar memenuhi putusan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi. Apabila barang bergerak tersebut tidak mencukupi maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan ini dinamakan penyitaan eksekutorial yang dilakukan oleh panitera dibantu dua orang saksi.¹⁶

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat mengajukan restitusi untuk korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pada Pasal 5 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban "hak yang dimaksud pada angka (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Tindak pidana tertentu di atas yakni termasuk tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. LPSK akan mengajukan restitusi baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Dilihat pada kasus Quotex, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG permohonan Restitusi dan Kompensasi yang diajukan oleh korban yaitu Permohonan dari Finsensus Mendrofa & Partners (FMP Law Firm), Permohonan dari Perhimpunan Paguyuban Doni Salmanan yang diwakili oleh Feliks Multiwijaya tertanggal 19 Oktober 2022, dan Permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 24 Oktober 2022 adalah terkait tindak pidana Informasi dan Teknologi (ITE) maupun tindak pidana pencucian uang sehingga tidak termasuk ruang lingkup yang dapat dimohonkan Restitusi dan Kompensasi sebagaimana secara limitatif tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 sehingga permohonan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

Permohonan pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 angka (1) huruf a dan b ditentukan ruang lingkup permohonan Restitusi dan Kompensasi. Pasal 2 angka (1) huruf a menyatakan, bahwa permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan keputusan LPSK. Dalam Pasal 2 angka (1) huruf b menjelaskan bahwa permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Mengenai barang bukti, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, maka Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum dengan memperhatikan Undang-undang yang berlaku sekarang, KUHP baru (Undang-undang

¹⁶ Khalid Dhiya Ul Haqq. 2022. "Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option", *Jurnal Pro Hukum*, p. 375.

¹⁷ *Ibid.*

Nomor 1 Tahun 2023). Bahwa dalam Pasal 91 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan: “Perampasan barang tertentu dan atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 angka (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi barang tertentu atau tagihan: d. Milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, e. Dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana”. Keberadaan barang bukti yang dihubungkan dengan ketentuan pasal diatas barang milik Terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana maupun berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana merupakan barang bukti yang dapat dirampas. Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas terdapat pertentangan peraturan (disharmonisasi regulasi) yang mana pada Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 masyarakat dapat mengajukan gugatan perdata permohonan Restitusi dan Kompensasi sebagai upaya perlindungan hukum. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG barang bukti yang disita tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara.

Bentuk Perlindungan Hukum Represif penyelesaian sengketa yang diberikan bagi Pihak korban yang akan mengajukan gugatan dalam perkara perdata terhadap pihak pelaku usaha binary option melalui Pengadilan. Dalam putusan yang diberikan hakim terkait kasus Quotex atas nama Doni Salmanan, dinyatakan bebas atas ganti kerugian.¹⁸ Karena barang bukti sitaan tidak dapat dikembalikan kepada korban dan dirampas untuk negara.

Doni Salamanan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan aplikasi trading Quotex yang dilaporkan seseorang berinisial RA pada 3 Februari 2022 ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Pelaporan ini di latar belakang oleh RA yang menonton akun Youtube *channel* King Salamanan yang diketahui milik Doni Salmanan. Pada video tersebut RA melihat video kendaraan mewah yang katanya hasil dari *trading binary option* Quotex. Hal yang memberatkan Doni Salmanan di Pengadilan sebagai *affiliator platform* Quotex, melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak jujur dalam mempromosikan *platform* Quotex kepada para membeinya, telah berhasil mengajak kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) orang untuk mendaftar Quotex melalui akun media sosialnya¹⁹, member kehilangan uang yang di depositokan ke akun Quotex. Sehingga dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan kepada Doni Salamanan ialah Pasal 1365 KUHPerdata:

“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

Doni telah menikmati hasil kejahatannya baik berupa uang ataupun barang-barang mewah yang telah disita secara sah. Dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Promosi *binary option* berkedok investasi *trading secara online* adalah untuk mengelabui para calon *member*. Dalam praktiknya tidak ditemukan adanya komoditi yang di perdagangkan, trader hanya bisa memilih aset yang akan diperdagangkan berupa mata uang, indeks saham, kripto dan komoditas. Setelah *trader* menentukan asetnya, mereka harus mempertaruhkan

¹⁸ Rizqiah Safitri, Arfan Kaimuddin , Ahmad Bastomi. 2023.“Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option”. *Dinamika*, 29(1), p. 6807.

¹⁹ Op-Cit, p. 20.

sebagian modal yang dimiliki. Para trader memprediksi atau menebak harga pada sebuah aset, naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Peran Doni Salmanan sebagai *affiliator* ialah mempromosikan aplikasi Quotex melalui akun youtube nya dengan iming-iming keuntungan besar dan juga kerap memamerkan hartanya yang disebut dari keuntungan main Quotex demi bisa mengajak lebih banyak pengguna. Tetapi nyatanya Doni Salmanan tidak bermain *trading* dalam aplikasi tersebut. Melainkan hanya menjadi *affiliator* untuk mendapatkan keuntungan dari *member/*afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di aplikasi Quotex.

Secara substansi operasional yang sesungguhnya adalah kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Bappebti nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010. Kegiatan perdagangan *online* yang dilakukan Quotex bersifat illegal dan tanpa izin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan teori perlindungan hukum untuk menjamin bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek tersebut tidak sejalan dengan kondisi ini dikarenakan adanya aturan yang bertentangan (disharmoni regulasi) mengenai upaya pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi ke pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG yang mengenyampingkan dan menolak permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan korban serta perampasan barang bukti untuk negara atau tidak dikembalikannya barang bukti yang disita sehingga gugatan perdata yang dilakukan korban juga sia-sia. Dan mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum.

3.2. Peran Bappebti Terhadap Investasi Ilegal Yang Beredar Akibat Promosi Media Online Oleh Influencer

Peran dan tujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam menangani perusahaan investasi ilegal di Indonesia, Bappebti memiliki beberapa peranan penting, yaitu mengawasi, memblokir iklan, situs dan *platform* investasi yang melanggar aturan hukum. Tindakan memblokir situs-situs investasi ilegal yang dilakukan Bappebti tidak akan memberi efek jera kepada perusahaan investasi ilegal. Karena di dunia digital yang sudah maju, membuat web atau situs baru sangatlah mudah dan cepat.

Dengan aktifnya promosi yang dilakukan oleh *platform* Quotex yang secara terang-terangan seharusnya Bappebti bisa mencurigai dari jauh-jauh hari dan melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan berjangka komoditi secara tegas dan maksimal.

Bappebti mengupayakan tindakan pencegahan kepada investor dengan terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Ini terkait peran Bappebti sebagai lembaga pengawas dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Bappebti akan terus melakukan edukasi tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah kepada masyarakat. Terlebih saat ini banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Menteri Perdagangan menekankan konsep pentingnya 7P sebelum masyarakat memulai berinvestasi di bidang PBK sebagai pedoman pelaksanaan investasi dalam upaya perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Pelajari latar belakang perusahaan;
- 2) Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan;

- 3) Pelajari kontrak berjangka yang diperdagangkan.
- 4) Pelajari wakil pialang PBK yang berizin dari Bappebti,
- 5) Pelajari dokumen perjanjian,
- 6) Pelajari risiko,
- 7) Pantang percaya pada janji-janji keuntungan yang tinggi.²⁰

Regulasi mengenai pengaturan trading dengan *binary option* ini masih belum jelas pengaturannya dan belum ada peraturan yang menyebutkan bahwa *binary option* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau bukan dengan melihat sistem permainannya yang lebih ke bisnis spekulasi. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

“Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka antara lain melalui Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia”

Dimana pada pokoknya Bappebti hanya bisa melarang promosi dan kegiatan pelatihannya namun tidak bisa melarang orang-orang bertransaksi pada *trading binary option* karena memang sampai saat ini masih ada di masyarakat. Mengenai ketentuan Pasal 7 peraturan kepala bappebti tersebut hanya menyebutkan akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila melanggar Pasal 6 tapi tidak secara tegas menyebutkan ketentuan yang akan diberlakukan apalagi faktanya regulasi mengenai *binary option* berikut affiliatornya masih belum ada peraturan spesifik yang mengatur hal tersebut.

Bappebti tergabung di dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 instansi. SWI merupakan forum koordinasi 13 instansi dan tidak melakukan proses penegakan hukum. Penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Penanganannya memerlukan koordinasi antarregulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait. SWI melakukan rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam dua bulan. Pelaksanaan tugas SWI dalam hal pencegahan (preventif) adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan rekomendasi dan menyusun regulasi, dan melakukan pemantauan kegiatan investasi ilegal. Sementara dalam hal penanganan kegiatan investasi ilegal, pelaksanaan tugas SWI dilakukan melalui pemeriksaan bersama (on/off site), memberikan rekomendasi ke instansi terkait untuk melakukan penanganan, dan penghentian kegiatan investasi ilegal yang tidak berizin.²¹

Setelah melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat, selama tahun 2021, Kementerian Perdagangan memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok *trading*.²² Upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dibawah Kementerian Perdagangan

²⁰ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Wamendag Tekankan 7P Sebelum Berinvestasi di Bidang PBK, Siaran Pers, Jakarta, 27 Mei 2022, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10435.

²¹ *Ibid.*

²² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal, Siaran Pers, Jakarta, 2 Februari 2022, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579

berkomitmen untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option (opsi biner). Ribuan website yang diblokir tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya.²³

Pemblokiran situs-situs website perdagangan berjangka tanpa izin dilakukan berlandaskan dasar hukum yang jelas, yaitu:

- a. Pasal 49 (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- b. Pasal 2 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- c. Pasal 156 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- d. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Binary option (opsi biner) merupakan kegiatan judi daring berkedok *trading* di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.

Pengawasan dan pengamatan yang rutin dilakukan Bappebti terhadap situs-situs web di bidang PBK yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti, dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian masyarakat. Mengingat saat ini bermunculan modus baru untuk menarik masyarakat agar tergiur menjadi investor di bidang PBK tanpa memperhatikan pengetahuan tentang mekanisme trading di bidang tersebut. Bappebti juga mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran dalam waktu singkat. Masyarakat juga diharapkan agar selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline (jaringan bawah). Konsep jaringan bawah tidak dikenal dalam perdagangan berjangka.

Pada Mei 2020 Bappebti telah memblokir 112 halaman Facebook, 73 akun instagram, dan 45 domain tidak berizin. Dengan demikian, selama Januari-Juni 2020, Bappebti telah memblokir 266 akun/konten media sosial dan 581 domain tidak berizin.²⁴ Bappebti akan terus melakukan penertiban terhadap promosi atau iklan perdagangan komoditi ilegal yang beredar di masyarakat, baik yang tayang di media cetak maupun media elektronik. Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai pialang berjangka. Meskipun mengaku telah memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia wajib mengantongi izin dari Bappebti.

²³ *Ibid.*

²⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Gandeng Kominfo, Bappebti Tertibkan Promosi Investasi Ilegal di Media Sosial, Siaran Pers, Jakarta, 9 Juli 2020, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/5714,

Bappebti telah mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan di bidang perdagangan berjangka komoditi melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010. "Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka atau pengelola sentra dana berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka, baik melalui promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia". Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist menyatakan, pemerintah mendukung masyarakat untuk berkreasi. Namun, masyarakat harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya bidang perdagangan berjangka dan komoditi.

Satgas Waspada Investasi (SWI) memberantas binary option ini karena ilegal dan menimbulkan banyak kerugian masyarakat. Penanganannya saat ini di tangan kepolisian untuk di proses hukum. Diharapkan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat lain agar tidak melakukannya lagi.²⁵

Diharapkan setiap pihak, termasuk pemberi pengaruh (influencer) di media sosial agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat konten di sosial media dan membantu pemerintah untuk membatasi ruang gerak pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti dalam melakukan promosi di Indonesia. Konten video di kanal Youtube yang mempromosikan atau mengiklankan pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti biasanya dikemas dengan judul tutorial untuk membuka akun, melakukan deposit, melakukan penarikan dana, dan tutorial lainnya untuk memperoleh keuntungan di perdagangan berjangka. Bappebti mengimbau masyarakat agar selalu waspada sebelum memilih instrumen investasi. Masyarakat diharapkan dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai profil perusahaan, paham terhadap risikonya, tidak mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan, dan selalu melakukan pengecekan legalitas perusahaan berjangka melalui situs resmi Bappebti.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media *online* influencer melalui akun youtube berupa, Perlindungan hukum preventif dilakukan Bappebti dengan cara edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi serta pengawasan dari pengawas perdagangan berjangka. Pemblokiran situs-situs web perdagangan berjangka ilegal oleh Bappebti yang tergabung di dalam Satgas Waspada Investasi (SWI). Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap beberapa konten video yang tayang di kanal Youtube. Dalam pengawasan tersebut, Bappebti telah menemukan konten video mempromosikan perdagangan berjangka yang mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti. Bekerja sama dengan Kemenkominfo, Bappebti tertibkan promosi investasi ilegal di media sosial terutama akun kanal Youtube. Bappebti mengupayakan tindakan pencegahan kepada investor dengan terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Bappebti akan terus mengedukasi masyarakat tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Perlindungan hukum represif dapat

²⁵ Bappebti, (2022), "Cerdas Bertransaksi Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi", *Buletin Bappebti*, Mei 2022, p. 25

dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata oleh para investor yang dirugikan dikarenakan Doni Salmanan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan informasi yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi investor. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahan tersebut. Serta dapat mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi melalui gugatan perdata. Adanya pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/PID.SUS/2023/PT dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pengajuan gugatan permohonan Restitusi dan Kompensasi mengakibatkan investor tidak mendapatkan perlindungan hukum secara represif.

Daftar Pustaka

Buku

- Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Febrianto. (2022). *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Illegal Binomo*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. (2017). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bappebti, (2022), *Cerdas Bertransaksi Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Buletin Bappebti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Jurnal

- Kadek Endra Bayu Sudiarta. (2013). "Perlindungan Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktek Manipulasi Dalam Pasar Modal, *Jurnal Kertha Semaya*, 1(8), p. 2-6.
- Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. 2(1). 1-8.
- Khalid Dhiya Ul Haqq. (2022). Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option. *Jurnal Pro Hukum*. 11(1). 369-379.
- Nando Mantulangi. (2017). "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong". *Jurnal Lex Administratum*, 5(1), p. 108-115.
- Mila Surahmi. (2019). " Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang)". *Jurnal Thengkyang*. 2(1), p. 86-104.
- Rizqiah Safitri, Arfan Kaimuddin , Ahmad Bastomi. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option. *Dinamika*. 29(1).

Internet:

- BAPPEBTI. (2022). *"Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia"*, http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf. diakses pada 19 September 2022.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Wamendag Tekankan 7P Sebelum Berinvestasi di Bidang PBK, Siaran Pers, Jakarta, 27 Mei 2022, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10435 pada 20 Februari 2023.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Gandeng Kominfo, Bappebti Tertibkan Promosi Investasi Ilegal di Media Sosial, Siaran Pers, Jakarta, 9 Juli 2020, diakses dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/5714 20 Februari 2023.
- KONTAN, *"BAPPEBTI Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia"*, (2020), <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal>. Diakses pada 21 September 2022.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579. Diakses pada 20 Februari 2023.